



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 185/HUMAS PMK/VIII/2021

Menko PMK Sidak Ke Pandeglang, Cek Masalah Beras 'Batu'

KEMENKO PMK -- Penyaluran bantuan sosial beras 10 Kg dalam masa PPKM di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sempat ramai diperbincangkan di media massa. Sebab, beras dari Perum Bulog yang disalurkan PT Pos Indonesia ke warga ditemukan menggumpal layaknya batu dan kurang layak untuk dikonsumsi.

Menanggapi masalah itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Pandeglang dan tempat penggilingan gabah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Jumat sore (6/8).

Dalam sidaknya itu, Menko Muhadjir mendapatkan laporan dari pihak PT Pos, dan Perum Bulog, bahwa masalah beras menggumpal yang didistribusikan sebelumnya itu dikarenakan terkena hujan. Berdasarkan laporan, semua beras yang bermasalah itu sudah ditarik dan diganti dengan beras baru yang layak dikonsumsi.

"Jadi sebetulnya sudah tidak ada masalah. Sudah diganti dari para Keluarga Penerima Manfaatnya. Dan beras itu sudah ditarik. Bahkan yang ditarik bukan hanya beras yang bermasalah tapi seluruhnya ditarik dan dicek semuanya. Dan itu saya kira ini langkah yang cepat dan bagus," ujar Menko PMK di Pandeglang.

Menko Muhadjir mengingatkan agar beras yang diberikan sebagai bantuan sosial adalah beras yang layak konsumsi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, beras yang disalurkan minimal berkualitas medium.

"Jangan sampai kita gak mau makan beras itu malah kita berikan kepada orang lain. Karena itu berasnya medium yang kita tetapkan," pesannya.

Selain itu, Menko PMK juga meminta agar beras yang dimanfaatkan untuk bantuan sosial dari produksi petani lokal. Dia mengapresiasi pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah memanfaatkan beras petani lokal.

"Tadi saya diberitahu Bu Bupati, semua berasnya adalah produksi petani lokal. Dan ini penting, karena kita harapkan produksi petani di daerah itu betul-betul terserap dan termanfaatkan," imbuhnya.

Dengan memanfaatkan beras produksi petani lokal, menurut Muhadjir, akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Tetapi, dia juga mengingatkan agar petani lokal tidak meraup untung yang berlebihan.

"Sekarang ini Alhamdulillah kan harga gabah, harga beras sudah mulai naik. Saya mohon para petani dan tengkulak menahan diri untuk tidak mengambil untung banyak-banyak. Semuanya harus merasa prihatin," terangnya.

*Minta Tingkatkan Kualitas Beras Pandeglang

Berdasarkan Laporan Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Narulita, Kabupaten Pandeglang merupakan lumbung beras untuk Provinsi Banten. Produksi beras juga surplus dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh Banten.

Karena itu, Muhadjir meminta kualitas beras di Kabupaten Pandeglang lebih ditingkatkan, terutama dalam penanganan pasca panen dan produksi.

"Tadi Bu Bupati sudah menyampaikan, di sini adalah penghasil padi surplus, hasil panen di sini surplus. Artinya ada beras yang bisa dijual ke luar. Dan itu supaya mampu bersaing kualitasnya harus bagus. Berasnya sudah bagus, tapi pasca panennya harus dibenahi," ujarnya.

Namun, dalam proses produksi beras masih ditemukan kendala. Dia mendapatkan laporan bahwa di Kabupaten Pandeglang masih banyak penggilingan gabah yang masih menggunakan mesin tradisional dan kurang memadai untuk menggiling beras.

"Tadi Bu Bupati juga sudah berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengolahan dari gabah menjadi beras supaya lebih baik. Karena kalau nanti pengolahan pasca panennya bagus itu beras dari Pandeglang ini bisa berkompetisi dengan beras dari daerah lain," ujarnya.

Selain itu, mesin pengeringan gabah di Kabupaten Pandeglang juga masih kurang memadai. Karena itu, Muhadjir meminta juga agar pengering gabah bisa lebih dimodernisasi.

"Tadi Bu Bupati menyampaikan ada ribuan ton hasil panen yang tidak bisa dibeli Bulog karena kandungan airnya masih di atas rata-rata yang ditetapkan bulog. Jadi ada problem juga di dalam soal pengeringan," ucap Menko PMK.

Muhadjir juga akan berusaha membantu mencari jalan keluar untuk masalah ini dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Nanti akan saya coba deh bicarakan dengan Pak Menteri Pertanian. Mudah-mudahan ada jalan keluar," pungkasnya. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**